

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada bab 1 sebelumnya. Dalam menyusun penelitian ini, dapat dipelajari dari beberapa penelitian sebelumnya apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi GCG dan Ukuran Perusahaan. Penelitian-penelitian yang dimaksudkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Maryanti dan Fithri (2017:33). Melakukan penelitian tentang *corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance*, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa *Good Corporate Governance* yang dibentuk dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen. Sedangkan *Good Corporate Governance* yang dibentuk dari kepemilikan institusi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen secara tidak langsung melalui kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusi dan komite audit secara tidak langsung melalui kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Veno (2015:109). Meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur go Public (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011 - 2013). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Bukhori (2015:9) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan (Studi

empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2010). Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, semakin besar jumlah dewan direksi juga akan meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Semakin banyak dewan komisaris, maka dewan komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalankan peran.

Tambunan, Prabawani (2018:32) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, struktur modal secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, diketahui bahwa dari ketiga variabel independen tersebut, leverage memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kinerja keuangan.

Sarafina, Saifi (2017:45) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). Hasil penelitian pada uji F bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan, dan berdasarkan hasil uji T diperoleh bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan.

Tas, Tan (2016:163) meneliti tentang Tata kelola perusahaan, kepemilikan asing, dan synchronicity harga saham : bukti dari bursa, Istanbul. Hasil dari penelitian ini yaitu persentase direktur independen di dewan direksi atau dewan direksi independensi berhubungan negatif dengan sinkronisasi harga saham. Hal itu dapat mendukung orang luar atau independen direktur di dewan memberikan mekanisme yang meningkatkan lingkungan informasi perusahaan. Sinkronisasi lebih tinggi

untuk perusahaan yang telah terdaftar sebelumnya. Perusahaan yang lebih tua cenderung mencerminkan perusahaan yang spesifik. Pemilik asing dan dewan independen memiliki peran penting pada penggabungan yang lebih besar dari informasi spesifik perusahaan ke dalam harga saham. Hasil penelitian ini mengarah untuk mendorong kepemilikan asing dan lebih banyak direktur independen di tingkat perusahaan tata kelola yang meningkatkan lingkungan informasi perusahaan di Turki. Perusahaan dengan tata struktur tata kelola yang baik cenderung memiliki lebih banyak informasi spesifik perusahaan yang dimasukkan ke dalam saham mereka.

Sumarno, Widjaja, Subandriah (2016:194) meneliti tentang dampak *Good Corporate Governance* terhadap manufaktur keuntungan perusahaan dan nilai perusahaan. Penelitian menyimpulkan bahwa Peran Pemangku Kepentingan dalam *Good Corporate Governance* secara signifikan dan mempengaruhi ROA secara positif. Pengungkapan dan Transparansi secara signifikan dan negative mempengaruhi ROA. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Direksi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA.

Aon Waqas Awan (Correspondingauthor) and Javed Ahmed Jamali (Principal author). Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan: Pada Perusahaan yang Terdapat di Bursa Efek Karachi, Pakistan periode (2005-2014). Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar pada Bursa efek Karachi; dari empat sektor seperti, perusahaan asuransi, perbankan, perbankan investasi dan industri gula. Hasil Penelitian ini yaitu, praktik tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dewan, komite audit memiliki hubungan positif dengan margin laba dan pengembalian ekuitas.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk

melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan Darmawati,dkk (2005:32) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko.

1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent.
2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan,
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan untuk stake holders dan menciptakan kepatuhan setiap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Sedangkan Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP117/M-MB/2002 (2002:pasal1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”

Menurut Effendi (2016:3) pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.

Menurut Agoes (2013:101), definisi dari *Good Corporate Governance* adalah :

“tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya .”

Sedangkan Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan, pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governace* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate Governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa *corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatr, mengelola, mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar .

Penerapan *Good Corporate Governance* sendiri diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah akibat dari benturan kepentingan antara pihak yang terkait baik untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. *GCG* dimaksudkan untuk mengatur hubungan dan mencegah akan terjadinya

kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera .

2.2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Di dalam Surat keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 menjelaskan tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keutusan ini meliputi :

1. “Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Prinsip tentang *Good Corporate Governance* terdapat dari berbagai sumber dengan hakikatnya yang sama. Berbagai aturan mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Selain pengelolaannya yang harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, keberhasilan BUMN dalam

menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Penilaian atas kinerja keuangan BUMN dapat dilihat dari laporan keuangan BUMN tersebut. Laporan keuangan ini disajikan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk transparansi. Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat.

2.2.2.3 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN membutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Adrian (2011:23), unsur-unsur *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- a. Pemegang Saham
- b. Dewan Direksi
- c. Dewan Komisaris
- d. Manajer
- e. Karyawan
- f. Sistem Remunerasi berdasarkan kinerja
- g. Komite Audit

Unsur-unsur yang diperlukan oleh perusahaan :

- a. Keterbukaan dan Kerahasiaan (*Disclosure*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Kesetaraan
- e. Aturan dari *code of conduct*

2. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari :

- a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b. Investor
- c. Instansi penyedia informasi
- d. Akuntan *public*
- e. Intitansi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan

- f. Pemberi pinjaman
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah :

- a. Aturan dari *code of conduct*
- b. Kesetaraan
- c. Akuntabilitas
- d. Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.2.2.4 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Manfaat *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan.

Zarkasy, Wahyudin (2014:19): penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-trategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor

Dengan adanya corporate governance yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan

masuk dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. Selain itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada system yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

2.2.2.5 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam lingkungan BUMN menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 yang dalam Meilani Hamdani dan Gunoro Nupikso (2016:36) yaitu :

1. Memaksimalkan dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi dan efektif.
3. Mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosia BUMN terhadap pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Penerapan GCG dapat dilihat dari laporan pengungkapan GCG yang biasanya disajikan dalam laporan tahunan BUMN atau laporan tersendiri yang terpisah dari laporan tahunan.

2.2.3. Dewan Komisaris Independen

2.2.3.1. Pengertian Dewan Komisaris Independen

Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk 14 mendorong diterapkannya good corporate governance. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006, dalam Meliliani, 2013:72), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017:45) menyatakan

bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut

2.2.3.2. Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012:47) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI: Proporsi Dewan Komisaris Independen

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan

pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

2.2.4. Dewan Direksi

2.2.4.1 Pengetian Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa organisasi swasta dan nirlaba. Dewan direksi merupakan aspek yang mempengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. (Wikipedia, 2007).

Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur.

Pada umumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain :

- a) Eksternal
 - 1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis kerjasama dengan perusahaan lain,
 - 2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.
- b) Internal

1. Mengurus dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.
2. Menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan,
3. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan kebijakan perusahaan,
4. Memilih , menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
5. Melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
6. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan,

Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana. Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan.

2.2.4.2 Metode Pengukuran Dewan Direksi

Menurut Rohmansyah (2017:54) Dewan Direksi dapat diukur dengan menggunakan:

Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi Di Perusahaan
--

2.2.5. Komite Audit

2.2.5.1. Pengetian Komite Audit

Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2017) adalah:

“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit .”

Menurut Arents (2010:23), menjelaskan pengertian komite audit adalah:

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga ata lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

"Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Komite audit merupakan orang yangnng melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016:32).

2.2.5.2. Metode Pnegukuran Komite Audit

Menurut Robert Jao (2011:32), komite audit diukur dengan menggunakan:

Komite Audit= Jumlah Anggota Rapat Dalam Satu Tahun

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011:12), komite audit dapat diukur dengan menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit Di Perusahaan}$$

Rumus tersebut untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

2.2.6. Ukuran Perusahaan

2.2.6.1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut Muhammad (2010:12) adalah :

“Perusahaan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dengan acuan laba.”

Arti (2015:25) mengungkapkan Perusahaan adalah :

“perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.”

Sedangkan menurut Sumami (1997:112) yang mengungkapkan bahwa:

“Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah seluruh organisasi yang melakukan kegiatan produksi baik dalam bentuk

barang maupun jasa bagi masyarakat, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut.

2.2.6.2. Pengertian Ukuran Perusahaan

Perusahaan Pengertian Ukuran Perusahaan menurut Riyanto (2012:305) adalah :

“ukuran perusahaan menggambarkan besar dan kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada nilai equity, nilai penjualan, dan nilai aktiva.

Sedangkan menurut Jugiyanto (2016:282) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.

Demikian pula menurut Mandiyono dan Sugiarti (2015:36) ukuran perusahaan adalah :

“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya.

2.2.6.3. Klasifikasi Ukuran

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro,

usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.6.4. Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasi menjadi perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil melalui indikator yang digunakan perusahaan tersebut.

Indikator dalam ukuran perusahaan menurut Suwitno dan Herawaty (2015:24) adalah :

“tolak aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain”.

Sedangkan Sudarmadji dan Sularto (2007:29) mengungkapkan bahwa

:

“Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat”.

Ferry dan Jones (2014:32) menyatakan bahwa :

“Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari perusahaan tersebut”.

Bestivanto (2013:15) mengungkapkan bahwa :

“Ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil”.

Menurut Murhadi (2013) dalam Maretha (2016:27) mengungkapkan bahwa :

“Firm Size diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2016:282), diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva. Metode tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran ukuran perusahaan adalah Logaritma Total Aset. Indikator ini dipilih karena menggambarkan

kekayaan perusahaan. Hal ini akan memancing investor ataupun kreditor untuk menanamkan modal mereka. Suatu perusahaan yang besar hanya akan punya pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Jika nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya.

2.2.7. Kinerja Keuangan

2.2.7.1. Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Fahmi (2014:5) menjelaskan bahwa:

“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/program/kebijaksanaan dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu organisasi, secara umum kinerja dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.”

Sedangkan menurut Edison (2016:19) menyatakan bahwa :

“Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Mangkunegara (2009:49) dalam Jurnal Setyowati & Haryani (2016) mengemukakan bahwa :

“Kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya”.

2.2.7.2. Pengertian Kinerja Keuangan

Syafarudin (2003:96) mengemukakan kinerja keuangan merupakan:

“Kinerja keuangan merupakan mengukur sampai sejauh mana prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa :

“Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah proses dan hasil kerja dari suatu perusahaan yang biasa dijadikan alat ukur untuk pencapaian keberhasilan perusahaan.

2.2.7.3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir (2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu :

1. “Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilakukan baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutang-hutangnya serta membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan”.

Sedangkan Mangkunegara (2015:67) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor kemampuan (*ability*). Secara psikologis kemampuan (*ability*) dan kemampuan reality (*knowledge dan skill*) artinya pegawai dengan IQ di atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Faktor motivasi. Motivasi berbentuk sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* ikut berperan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2.7.4 Tahap – Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:4) menyatakan bahwa ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum sebagai berikut :

1. “Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat tersebut dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sdang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari beberapa perusahaan yang lain..

Ada 2 (dua) metode yang umum digunakan untuk melakukan perhitungan tersebut, yaitu :

- a. *“Time Series Analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross Sectional Approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisi melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.
5. Mencari serta memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini setelah ditemukannya solusi guna memberikan suatu masukan supaya apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat diselesaikan”

2.2.7.5. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan bisa dilihat dari analisis laporan keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan tersebut yang paling umum digunakan yaitu analisis rasio keuangan .

Riyadi (2006:155) menyatakan bahwa :

“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan baik, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil

perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada periode tertentu”.

Menurut Hanafi (2016:74) nalisis Rasio diantaranya sebagai berikut :

1. “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas terdiri dari : *cash ratio, current ratio, acid test ratio atau quick ratio*.
2. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktifitas asset. Rasio Aktivitas terdiri dari : *inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, days sales outstanding, total assets turnover*
3. Rasio Solvabilitas, untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio Profitabilitas, untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas). Rasio Profitabilitas terdiri dari : *Profit Margin, Return On Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Earning PerShare (EPS)*”.

a. *Return On Investment (ROI)*

Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

b. *Return On Asset (ROA)*

Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan

atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.

c. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat utama untuk investor yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum *ROE* dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu tahun terakhir.

d. *Earning Per Share (EPS)*

EPS adalah alat analisis tingkat profitabilitas perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. *EPS* adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping *PER (Price Earning Ratio)* dalam lingkaran keuangan.

e. Rasio Pasar

Untuk melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan. Rasio Pasar terdiri dari : *price earning ratio, dividend yield, dividend payout ratio.*”

Dari kepat rasio diatas, penelitian ini menggunakan Return On Equity sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

2.2.7.6. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja memiliki tujuan yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Hanafi (2016:69) menyatakan bahwa:

“pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing measurement (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi

perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu tertentu.”

Mulyadi (2016:415) menyebutkan bahwa :

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Secara formal produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja.

Menurut Mulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa :

“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Pandya dalam Tertius dan Christiawan (2015:53) dalam mengukur good corporate governance terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya ialah komisaris independen. Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian, pengetahuan, dan objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan bertanggung jawab untuk membawa penilaian independen dalam menanggung pada masalah strategi, kinerja, dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku.

El-Chaarani dalam Tertius dan Christiawan, (2015:32) semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih bagus dan sehat. Hal ini mendukung penelitian seperti yang dilakukan oleh Lestari dan Asyik (2015:63) yang menyatakan bahwa peran dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *ROA* dan *NPM*. Rofina dan Priyadi (2013:56) bahwa pelaksanaan *GCG* yang baik dan sesuai dengan peraturan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk

menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

2.3.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit memiliki peranan yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*.

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri dapat diminimalisasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih dan Yushita (2016:43) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan dinilai dengan logaritma natural nilai aktiva, dimana total aktiva menggambarkan nilai kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai total aktiva perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki harta yang semakin tinggi nilainya, sehingga bisa dikatakan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya nilai total aktiva suatu perusahaan.

Andriani, Agustami(2016:43), menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya maka penggunaan sumber daya yang ada bisa digunakan secara maksimal dan efisien maka memperoleh keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aktiva yang kecil tentu akan

menghasilkan keuntungan sesuai dengan aktiva yang relative kecil. Selain itu jika jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan besar maka akan menunjukkan ukuran perusahaan yang berkualitas serta kinerja yang baik dari perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin tinggi profit yang dihasilkan maka bisa dinyatakan semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Putu, Rastiana, Tenaya (2017:19), yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para stakeholder, agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini manajemen untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dimana semakin besar asset maka akan lebih mampu untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Bukhori (2017:79), membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut GCG merupakan salah upaya untuk menjadikan perusahaan bersih dan transparan. Dengan adanya penerapan GCG terutama pengawasan dari Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit akan terdapat dorongan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pada perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar *asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang dikelola semakin besar pula kemungkinan untuk menghasilkan laba. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015:43) yang membuktikan bahwa dalam penelitiannya, secara simultan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran

perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan kinerja keuangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) pengertian dari hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya baru jawaban yang berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

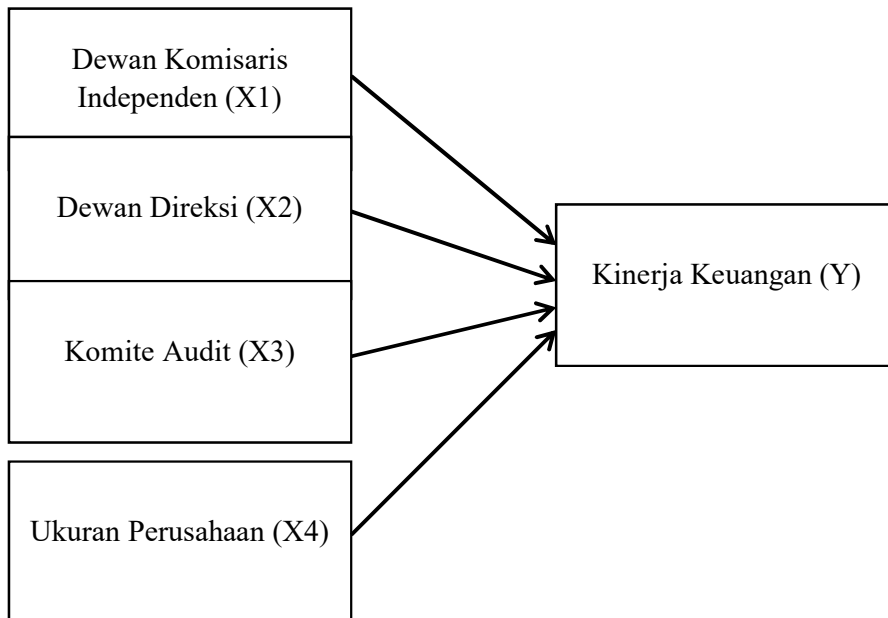
Hipotesis 1 = Terdapat Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 2 = Terdapat Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 3 = Terdapat Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 4 = Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.

2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual